



**MANFAAT *FAIR VALUE* BAGI PERUSAHAAN YANG
MENGADOPSI SAK ETAP KETIKA BERALIH KE IFRS
SECARA SUKARELA (KAJIAN LITERATURE)**

SKRIPSI

Oleh :

**FRANS NELSON MANDALA PUTRA SIBUEA
NPM : 11 833 0042**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/24

Judul Skripsi : MANFAAT *FAIR VALUE* BAGI PERUSAHAAN YANG MENGADOPSI SAK ETAP KETIKA BERALIH KE IFRS SECARA SUKARELA (KAJIAN LITERATURE)

Nama Mahasiswa : FRANS NELSON MANDALA PUTRA SIBUEA

No. Stambuk : 11 833 0042

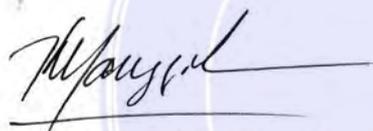
Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



(Karlonta Nainggolan, SE.,MS.Ac)

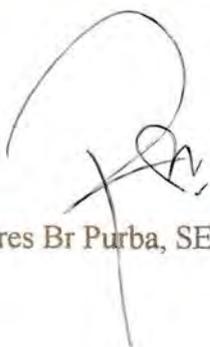


(Dra. Hj. Rosmaini, Ak.,MMA)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan



(Linda Lores Br Purba, SE.,M.Si)



(Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, SE.,M.Ec)

ABSTRAK

Frans Nelson Mandala Putra Sibuea, NPM : 11 833 0042, “Manfaat *Fair Value* Bagi Perusahaan Yang Mengadopsi SAK ETAP Ketika Beralih Ke IFRS Secara Sukarela (Kajian Literature)”. Skripsi 2015.

Penelitian ini meneliti tentang manfaat *fair value* yang akan diperoleh perusahaan yang mengadopsi SAK ETAP ketika beralih mengadopsi SAK berbasis IFRS. Dimana SAK ETAP secara garis besar melakukan penilaian terhadap aset tetap berdasarkan *historical cost*, sedangkan SAK berbasis IFRS secara garis besar memperbolehkan penilaian aset tetap berdasarkan *fair value*. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa penilaian aset tetap berdasarkan *fair value* memberikan manfaat yang sangat berarti bagi perusahaan dan para pengguna informasi. Manfaat yang diperoleh adalah: (1) Pengukuran *Fair Value* dapat mengurangi beban pajak perusahaan, bukan maksud semata – mata sebagai tindakan spekulasi, (2) Pengukuran *Fair Value* meningkatkan nilai atas aset tetap perusahaan, (3) Pengukuran *Fair Value* memperkuat total modal atau ekuitas perusahaan, (4) Pengukuran *Fair Value* yang relevan dapat mempengaruhi pengguna informasi untuk bersedia menanamkan modalnya kepada perusahaan, atau dengan kata lain pengukuran *Fair Value* mampu merangsang pertumbuhan modal perusahaan, (5) Pengukuran *Fair Value* yang relevan meyakinkan para kreditur untuk memberikan pinjaman, (6) Kenaikan nilai aset tetap berdasarkan nilai wajar (*fair value*) menaikkan total modal perusahaan, sehingga rasio solvabilitas perusahaan naik, (7) Pengukuran *Fair value* meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan perusahaan, karena *fair value* mencerminkan nilai realitas aset, dan (8) Pengukuran *Fair Value* lebih relevan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai dasar untuk meramalkan arus kas masa depan. Dan dengan kualitas relevansi yang lebih baik, pengukuran *Fair Value* mampu memberikan gambaran bagi perusahaan untuk merencanakan bisnis ataupun investasinya.

Kata kunci: *Fair value*, *Historical cost*, SAK ETAP, SAK berbasis IFRS

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada TUHAN Yesus Kristus karena atas Berkat dan Kasih Karunia-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program studi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dengan judul : Manfaat *Fair Value* Bagi Perusahaan Yang Mengadopsi SAK ETAP Ketika Beralih Ke IFRS Secara Sukarela (Kajian Literature).

Selama dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk sumbangan pikiran, tenaga, motivasi, semangat, pengertian, kepedulian dan waktu yang tiada terukur dalam penyusunan skripsi ini. Banyak pelajaran berharga yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis selama melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Keluh kesah, rasa lelah, ketakutan, dan kekhawatiran menghadapi hal-hal yang belum pernah dilewati membuat penulis belajar mengenai arti dari perjuangan, dan penulis yakin setiap usaha yang dilakukan dengan iman tanpa keraguan tapi dengan sungguh percaya dalam TUHAN pasti tidak akan sia-sia.

Oleh karena itu juga dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dimara Irianto Sibuea dan Ibu Clara Simamora, yang adalah orang tua kandung penulis yang sangat dikasihi, serta adik dan kakak penulis (Ria

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/24

ii

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/24

Vinta Uli Sibuea, Marlina Isabella Sibuea, Melva Srirezeki Sibuea, dan Josia Sibuea). Dimana mereka orang yang terhebat bagi penulis yang berjuang, memberikan motivasi yang luar biasa dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan hingga saat ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Yakub Matondang, MA, selaku rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. H. Sya'ad Afifudin, SE, Mec, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Herry Syahrial, SE, Msi, selaku pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Linda Lores Purba, SE, Msi, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
6. Bapak Drs. Zainal Abidin, MH, selaku Ketua pelaksanaan Meja Hijau.
7. Bapak M. Idris Dailimunthe, SE, Msi, selaku skretaris dalam pelaksanaan Meja Hijau.
8. Ibu Karlonta Nainggolan, SE, MSA, selaku dosen pembimbing I, terimakasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan selama bimbingan.
9. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA, selaku dosen pembimbing II, terimakasih bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama ini.
10. Untuk pemimpin rohani saya (Bapak Ps. DR. Gideon Morris Munthe, SE, M. Min; Ibu Ps. Dr. Rhema Munthe, Sp. A; Ps. Victory Faith Munthe, SP,

- M.Min; dan Ibu Ps. Joyce E. Natali Munthe, SP, M.Min) yang telah membimbing rohani saya dan mendoakan saya selalu. Jesus Bless Yours.
11. Untuk Ibu Warsani, SE, Ak, Msi, yang telah bersedia meminjamkan bukunya kepada saya untuk penyusunan skripsi saya.
 12. Untuk seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang telah membimbing saya selama periode akademik yang saya jalani di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
 13. Untuk staf dan pegawai akademik Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, yang telah membantu saya dalam kepengurusan berkas-berkas skripsi dan sidang saya hingga selesai.
 14. Untuk saudara/i rohani saya (Ka' Lasminar, Mis. Melly, Mis. Febri, Ka' Elrista Sinaga, Dr. Samuel Manalu, Minche Tobing, Henny Tobing, Sihar Togi, Ka' Uli, Riris, Juli Harianja, Asep, Sulaiman, Rudy, Anwar, Anton) yang selalu mendukung dan mendoakan saya selalu.
 15. Untuk rekan-rekan saya di pelayanan Himpunan Mahasiswa Kristen (HMK) Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, yang sangat saya kasihi (Daud Andre Sinamo, Junita Purba, Crisdayanti, Hansen Nainggolan, Mragaretha, Frans Weldeyer. Sahira Ginting, Rouli, Jhoni Wau, Jhon Purba, Sony Sianturi, Saka Dian, Nicea, Beni, Eko, dll.) yang selalu mendukung saya, mengerti, dan mendoakan saya selalu.
 16. Untuk sahabat-sahabat seangkatan saya di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area (Hana, Tika, Eli, Shinta, Juni, Ranti, Raulina, Evril, Esterlin, Iin, Nur, Rebeca, Andre, Juanda, Nani, Destry, dll.) yang selalu mendukung,

menolong, memberi motivasi satu dengan yang lain selama mengecap pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dan sepanjang penyusunan skripsi. Tuhan Yesus Kristus Memberkati kita dan Menjadikan Kita Sukses. Amin.

17. Dan untuk rekan-rekan saya yang lainnya yang tidak tersebutkan oleh saya.

Sungguh saya mengasihi kalian dan mengucapkan terimakasih atas semuanya. Tuhan Yesus Memberkati.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya tanpa henti penulis bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kehendak-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Medan, Juli 2015

Penulis

Frans Nelson M.P Sibuea.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
 BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1. Definisi Standar Akuntansi Keuangan	7
2.1.1. International Accounting Standards (IAS) dan International Financial Reporting Standards (IFRS)	8
2.1.2. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)	9
2.2. Konvergensi SAK Kepada IAS dan IFRS Dalam Kajian <i>Fair Value</i> dan <i>Historical Cost</i>	10
2.3. Laporan Keuangan	11

2.4. Aset Tetap.....	13
2.4.1. Pengukuran Aset Tetap Setelah Pengakuan Awal	14
2.5. Properti Investasi.....	14
2.5.1. Pengukuran Properti Investasi Setelah Pengakuan Awal.....	15
2.6. Definisi Fair Value	15
2.6.1. Definisi Transaksi Wajar (<i>Arm's Length Transaction</i>).....	16
2.6.2. Latar Belakang Konsep Akuntansi Fair Value.....	17
2.6.3. Pengukuran <i>Fair Value</i>	19
2.6.4. Keunggulan dan Kelemahan <i>Fair Value</i>	20
A. Keunggulan <i>Fair Value</i>	20
B. Kelemahan <i>Fair Value</i>	20
2.7. Definisi <i>Historical Cost</i>	21
2.7.1. Latar Belakang Konsep Akuntansi <i>Histoircal Cost</i>	21
2.7.2. Keunggulan dan Kelemahan <i>Historical Cost</i>	22
A. Keunggulan <i>Historical Cost</i>	22
B. Kelemahan <i>Historical Cost</i>	23
2.8. Revaluasi	23
2.8.1. Apakah Akumulasi Penyusutan Juga Direvaluasi	26
2.8.2. Cara Mencatat dan Menyajikan Nilai Revaluasi.....	27
2.9. Ilustrasi Pengukuran Berdasarkan <i>Fair Value</i> dan Pengukuran Berdasarkan <i>Historical Cost</i>	29
2.10. Penelitian Terdahulu.....	41
2.11. Kerangka Konseptual	42

2.12. Hipotesis 43

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Waktu Penelitian..... 45

 3.1.1. Jenis Penelitian..... 45

 3.1.2. Waktu Penelitian 45

3.2. Jenis dan Sumber Data 46

 3.2.1. Jenis Data 46

 3.2.2. Sumber Data..... 46

3.3. Teknik Pengumpulan Data 46

3.4. Teknik Analisis Data 47

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1. Pembahasan 48

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan..... 52

5.2. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1. Konvergensi SAK Kepada IAS	11
Tabel 2.7.1. Dampak Revaluasi Terhadap Laporan Keuangan	26
Tabel 2.9.1. Nilai Wajar Gedung Serbaguna	29
Tabel 2.9.2. Revaluasi Gedung Serbaguna, 31 Desember 2011	30
Tabel 2.9.3. Laporan Laba Rugi (Parsial – <i>Fair Value</i>)	33
Tabel 2.9.4. Laporan Ekuitas (Parsial – <i>Fair Value</i>)	34
Tabel 2.9.5. Neraca (Parsial – <i>Fair Value</i>)	34
Tabel 2.9.6. Laporan Laba Rugi (Parsial – <i>Historical Cost</i>)	39
Tabel 2.9.7. Laporan Ekuitas (Parsial – <i>Historical Cost</i>)	39
Tabel 2.9.8. Neraca (Parsial – <i>Historical Cost</i>)	40
Tabel 3.1.2.1. Rincian Waktu Penelitian	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.11.1. Kerangka Konseptual 42





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik atau entitas yang belum *go public*, “yang dalam pengukuran aset tetapnya secara garis besar menggunakan prinsip biaya historis (*historical cost*)” SAK ETAP (2013). Prinsip *historical cost* adalah “pengukuran yang berasumsi bahwa keadaan ekonomi atau nilai pasar stabil” (Sofyan Syafri, 2011: 320). Namun “seiring perkembangan zaman penggunaan *historical cost* tidak lagi relevan” Sofyan Syafri (2011: 324), karena “kondisi pasar yang berubah-ubah sangat cepat (inflasi)” Zaki Baridwan (2004: 334), sehingga *historical cost* tidak dapat mencerminkan keadaan nilai pasar terkait nilai aset tetap. Oleh karena itu laporan keuangan entitas yang mengadopsi SAK ETAP tidak mampu mencerminkan realitas ekonomi terkait nilai aset tetap.

Menurut Sofyan Syafri (2011: 321) “*Historical cost* merupakan salah satu prinsip dasar akuntansi”. Akan tetapi “informasi nilai wajar sangat berguna bagi aset. Estimasi nilai wajar sering kali menyajikan informasi lebih relevan tentang arus kas masa depan yang diharapkan terkait nilai aset” Kieso (2008: 44). Hal ini karena “*Fair value* adalah pengukuran berbasis pasar bukan pengukuran spesifik entitas” (Sofyan Syafri, 2011: 340). Informasi nilai wajar (*fair value*) memberi

informasi tambahan terkait aset tetap, yang digunakan pelaku pasar dan penilai profesional sebagai dasar penilaian realitas atas aset tetap.

Menurut Kerangka Dasar SAK (2012) menyatakan “tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan kepada pembuat keputusan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan”. “Angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan sistem akuntansi berdasarkan nilai pasar (*fair value*) mempunyai korelasi sangat kuat bagi pembuat keputusan” (Zein Yusuf, 2010). Oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan untuk mengadopsi standar akuntansi keuangan yang mengatur dan memperbolehkan sistem akuntansi berdasarkan nilai pasar (*fair value*). Standar akuntansi keuangan Indonesia yang sudah berbasis IFRS (*International Financial Reporting Standards*) yaitu SAK memperbolehkan dan mengatur pengukuran aset tetap dengan prinsip *fair value*. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur tentang pengukuran aset tetap dengan prinsip *fair value* adalah sebagai berikut:

1. PSAK 13 tentang Properti Investasi : “Pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal menggunakan model nilai wajar”.
2. PSAK 16 tentang Aset Tetap : “Pengukuran Aset Tetap setelah pengakuan awal menggunakan model nilai wajar”.
3. PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aset : “Pengukuran jumlah terpulihkan dilakukan dengan melakukan revaluasi, yaitu mengurangi nilai wajar terhadap biaya untuk menjual dan rugi penurunan nilai aset”.

SFAC no. 2 dalam Yolinda (2010) menyatakan bahwa “Kualitas utama dari pelaporan keuangan adalah informasi akuntansi harus relevan dan reliabel”. Suatu

informasi dalam laporan keuangan dinyatakan memiliki relevansi jika informasi tersebut mampu mempengaruhi keputusan investor dan informasi dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika informasi tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain. Akuntan dalam Yolinda (2010) meyakini bahwa “jika laporan keuangan mampu memenuhi kedua karakteristik tersebut, maka laporan keuangan akan berguna dalam pengambilan keputusan investasi”. Pengukuran berdasarkan nilai wajar (*fair value*) juga merupakan pengukuran yang relevan dan reliabel. Sebagaimana dinyatakan oleh Dewan Standar Keuangan Internasional dalam Yolinda (2010) bahwa “*fair value* merupakan satu-satunya konsep yang relevan dalam bisnis”, dan juga “*fair value* merupakan konsep yang reliabel karena memiliki bukti yang dapat diandalkan” PSAK 16 par. 32 (2012). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan pengukuran berdasarkan nilai wajar (*fair value*), perusahaan tetap dapat menjaga kualitas laporan keuangannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraph yang pertama dan kedua bahwa nilai wajar (*fair value*) memberi informasi tambahan tentang keadaan pasar terkait nilai aset tetap, dan dimana kecenderungan pasar yang berubah sangat cepat (inflasi). Hal ini membuat pengukuran berdasarkan nilai wajar (*fair value*) menilai aset tetap lebih tinggi dari pada pengukuran berdasarkan nilai historis (*historical cost*).

PSAK 16 par. 39 (2012) menyatakan “kenaikan nilai aset tetap memberi dampak terhadap laporan keuangan (posisi keuangan) perusahaan”. Namun, “dampak yang timbul dari kenaikan nilai aset tetap tersebut akibat dari revaluasi

(penilaian kembali) bukanlah suatu dampak yang merugikan bagi perusahaan, tetapi sebaliknya dampak yang ditimbulkan bermanfaat bagi perusahaan” (Sparta, 2011).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada paragraph-paragraph sebelumnya, ditambahkan juga dengan pernyataan yang menyatakan bahwa “dalam pembahasan akademik, sebenarnya sudah banyak yang menyorot dan mengkritik nilai historis dinilai tidak relevan dan kurang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen sehingga muncul ide pengukuran yang baru” (Sofyan Syafri, 2011: 328), salah satunya adalah pengukuran berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Manfaat *Fair Value* Bagi Perusahaan Yang Mengadopsi SAK ETAP Ketika Beralih Ke IFRS Secara Sukarela**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “**Apakah manfaat *Fair value* bagi perusahaan yang mengadopsi SAK ETAP ketika beralih ke IFRS ?**” rumusan masalah ini akan dikaji berdasarkan atas data sekunder yakni berupa teori-teori yang menjelaskan tentang *historical cost* dan *fair value* serta teori-teori yang menunjukkan perbandingannya.

1.3. Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian ini adalah hanya berfokus kepada *fair value* atas penilaian aset tetap dan properti investasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :
“Untuk mengetahui manfaat *Fair value* bagi perusahaan yang mengadopsi SAK ETAP ketika beralih ke IFRS”.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait, yaitu :

1. Bagi Penulis.

Bagi penulis, mendapatkan tambahan wawasan pengetahuan yang lebih dalam untuk memahami bidang hasil penelitian, dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh, serta mendapatkan pengalaman bagaimana menganalisis suatu masalah dengan berbagai metode yang telah didapat selama ini.

2. Bagi Perusahaan yang Menerapkan SAK ETAP.

Bagi perusahaan yang menerapkan SAK ETAP, kiranya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencatat akuntansi keuangannya.

3. Bagi Penelitian Selanjutya.

Bagi penelitian selanjutnya, kiranya dapat menjadikan tulisan ini sebagai bahan referensi untuk membuat penelitian selanjutnya dengan metode penelitian dan variabel yang berbeda sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan dapat digunakan sebagai informasi serta sumber ilmu pengetahuan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Standar Akuntansi Keuangan

Sofyan Syafri (2012: 153) menyatakan “standar akuntansi keuangan merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima oleh umum”. Standar ini diperlukan untuk menyamakan prosedur dalam segala hal yang terkait dengan pelaporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas bisa diperbandingkan dan dianalisis untuk kepentingan para pengguna laporan keuangan. Implementasi dari standar akuntansi keuangan sifatnya mengikat supaya laporan keuangan tersebut terhindar dari penyajian yang bias.

Keberadaan standar akuntansi keuangan cukup banyak yang pada umumnya digunakan untuk wilayah-wilayah tertentu. Sofyan Syafri (2011: 153) juga menyatakan “di Indonesia, standar akuntansi keuangan yang berlaku disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia kemudian menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sedangkan di USA berlaku *General Accepted Accounting Principles* (GAAP), kemudian *Accounting Principle Board Statement* (APBS), dan terakhir menjadi *FASB Statement*”. sedangkan standar akuntansi keuangan yang saat ini berlaku secara internasional adalah IAS (*International Accounting Standards*) yang mengatur standar keuangan dan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang mengatur standar pelaporan keuangan. PSAK (2012) menyatakan “Indonesia sudah melakukan

konvergensi SAK kepada IAS dan IFRS”. “Entitas atau perusahaan yang mengadopsi SAK konvergensi IFRS di Indonesia adalah entitas yang sudah *go public*” (Sofyan Syafri, 2011: 176). Sedangkan menurut SAK ETAP (2013) “untuk entitas yang belum *go public* (Usaha Kecil dan Menengah) diberikan pilihan untuk menerapkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)”. Jika beralih menerapkan SAK Konvergensi IAS dan IFRS, maka entitas tersebut harus konsisten dalam penerapannya dan tidak boleh kembali lagi menerapkan SAK ETAP.

2.1.1. *International Accounting Standards (IAS)* dan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*

IAS dan IFRS adalah standar keuangan internasional. Kieso (2008: 18) menyatakan “*International Financial Reporting Standards (IFRS)* merupakan standar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diterima umum digunakan secara internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)*”. Sedangkan *International Accounting Standards (IAS)* mengatur standar keuangan di seluruh dunia.

IAS 16 dalam Hennie (2013: 128) menyatakan “IAS memperbolehkan dalam pengukuran dan pengakuan aset tetap entitas berdasarkan nilai wajar (*fair value*)” dan Hennie (2013: 15) juga menyatakan “IFRS memperbolehkan untuk menyajikan laporan keuangan pada nilai yang disesuaikan dengan nilai pasar atau sering disebut nilai wajar (*fair value*)”. Pengukuran aset tetap berdasarkan *fair value* adalah pengukuran yang menunjukkan perbedaan atau

perubahan nilai dari aset tetap entitas yang berdasarkan keadaan pasar yang sebenarnya bukan lagi berdasarkan biaya perolehan (*historical cost*) karena perubahan nilai ekonomi dari waktu ke waktu (*Time Value of Money*).

2.1.2. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Dalam SAK ETAP (2013) dinyatakan bahwa “Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk perusahaan yang belum *go public* (Usaha Kecil Menengah)”. SAK ETAP dibuat agar perusahaan yang belum *go public* mampu menyusun laporan keuangannya sendiri sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dapat diaudit, dan mendapat opini audit, sehingga perusahaan yang belum *go public* dapat mengembangkan usahanya dalam upaya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam SAK ETAP (2013) juga dinyatakan bahwa “SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang pengukuran aset tetapnya menggunakan konsep biaya historis”. Menurut SAK ETAP (2013:49) “Entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap dan pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan”. Maka nilai aset yang dicatat adalah sebesar biaya perolehan. Dan dalam pengukuran setelah pengakuan awal menurut SAK ETAP (2013:50): “Entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi

penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Oleh karena itu di dalam SAK ETAP tidak diperkenankan penilaian kembali atau revaluasi”.

2.2. Konvergensi SAK Kepada IAS dan IFRS Dalam Kajian *Historical Cost* dan *Fair Value*

IFRS (*International Financial Reporting Standards*) adalah standar akuntansi keuangan yang lahir atau diadopsi dari IAS (*International Accounting Standard*). IFRS sebagai standar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. IFRS secara garis besar memperbolehkan adanya pengukuran aset entitas setelah pengakuan dengan menggunakan metode revaluasi atau penilaian kembali dengan menggunakan *fair value accounting*. Maka entitas diperbolehkan untuk menyajikan laporan keuangan pada nilai yang disesuaikan dengan nilai pasarnya atau sering disebut nilai wajar (*fair value*).

Indonesia memberlakukan Standar Akuntansi Keuangan berbasis IFRS secara efektif mulai per 1 Juni 2012. Di dalam pengadopsian atau proses konvergensi IFRS kepada Standar Akuntansi Keuangan Indonesia melalui banyak pertimbangan. Salah satunya yang menjadi pertimbangan adalah pengukuran aset entitas dengan metode *historical cost* atau *fair value*. Maka hasil dari konvergensi IFRS kepada SAK Indonesia dalam pertimbangan pengukuran aset entitas dengan *historical cost* atau *fair value* antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Konvergensi SAK Kepada IAS dan IFRS
(Tentang Pengatur Pengukuran Aset Tetap dengan Metode *fair value*)

PSAK	Adopsi dari IAS dan IFRS	KETERANGAN
PSAK 13 (Properti Investasi)	IAS 40 (<i>Investment Property</i>)	(1) Pengukuran aset entitas setelah pengakuan menggunakan model nilai wajar dan (2) Pengungkapan dengan model nilai wajar
PSAK 16 (Aset Tetap)	IAS 16 (<i>Property, Plant, Equipment</i>)	Pengukuran aset entitas setelah pengakuan menggunakan model revaluasi
PSAK 48 (Penurunan Nilai Aset)	IAS 36 (<i>Impairment of Assets</i>)	Pengukuran jumlah terpulihkan dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan Pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai menggunakan metode revaluasi

Dikutip dari SAK (2012).

2.3. Laporan Keuangan

Menurut Kieso (2008: 2) “laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas”. “Laporan keuangan juga menjadi wujud pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya-sumber daya yang dimiliki entitas dan digunakan untuk menjalankan roda bisnis entitas” (Kerangka Dasar SAK, par. 14, 2012).

Menurut IAI dalam Yolinda (2010) “laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki karakteristik relevan dan reliabilitas”. Mengingat fungsi penting dan

kualitas dari laporan keuangan, maka penting bagi entitas untuk melakukan penyusunan laporan keuangan dengan baik, benar, dan sesuai standar yang tinggi dan berlaku umum. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi asimetri informasi dikalangan pengguna laporan keuangan.

Kieso (2008: 18) menyatakan bahwa “IFRS (*International Financial Reporting Standards*) adalah standar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diterima umum dan digunakan secara internasional”. Menurut PSAK (2012) “saat ini Standar Keuangan (SAK) Indonesia sudah mengkonvergensi IFRS”. Hennie (2013: 15) menyatakan “IFRS memperbolehkan pengukuran berdasarkan nilai wajar (*fair value*)”. Oleh karena itu perusahaan yang mengadopsi SAK berbasis IFRS dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangannya berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

Kieso (2008: 44) menyatakan bahwa “secara umum, pengguna laporan keuangan lebih memilih menggunakan nilai historis (*historical cost*). Namun, pengukuran berdasarkan nilai wajar (*fair value*) tidak kalah pentingnya dan tidak kalah baik dibanding dengan nilai historis (*historical cost*), sebab berguna bagi aset perusahaan dan jauh lebih relevan dibanding nilai historis (*historical cost*)”. Oleh karena itu penyajian dan penyusunan laporan keuangan menggunakan nilai wajar (*fair value*) perlu diperhitungkan.

Pengukuran menggunakan nilai wajar (*fair value*) dalam menilai aset jauh lebih tinggi dibanding dengan menggunakan nilai historis (*historical cost*). Oleh karena itu terjadi kenaikan atas nilai aset. Kenaikan tersebut akan diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, sebagaimana yang diatur dalam

PSAK 16 par. 39 (2012): “jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan diakui dalam pendapatan komperhensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi”.

2.4. Aset Tetap

Menurut Warren (2008:57) Aset adalah “Sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis atau usaha. Sumber daya ini dapat berbentuk fisik ataupun hak yang mempunyai nilai ekonomis”. Aset merupakan kekayaan suatu entitas yang digunakan untuk operasional entitas atau bisnis entitas serta untuk melakukan investasi. Aset tetap terbagi atas dua jenis, yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud (*Intangible Assets*). Menurut PSAK 16 par. 6 (2012) definisi Aset Tetap adalah aset berwujud yang : “(a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”. Namun, Hennie (2013: 127) menyatakan aset tetap yang dimaksud tidak termasuk: “Aset tetap yang diklasifikasi sebagai milik untuk dijual, Aset biologik sehubungan dengan aktivitas pertanian, Aset eksplorasi dan evaluasi pertambangan sumber daya mineral atau hak mineral dan cadangan mineral, seperti minyak dan gas alam atau sumber daya yang tidak dapat diperbaharui sejenis”.

2.4.1. Pengukuran Aset Tetap Setelah Pengakuan Awal

Hennie (2013: 130) menyatakan “setelah pengakuan awal, entitas harus memilih apakah akan menggunakan model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi dalam akun aset tetap serta harus menerapkan kebijakannya tersebut pada seluruh jenis aset tetap”.

- Menurut PSAK 16 par. 30 (2012) “Model biaya: setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset”.
- Menurut PSAK 16 par. 31 (2012) “Model revaluasi: setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi”.

2.5. Properti Investasi

Hennie (2013: 143-144) menyatakan entitas memiliki properti sendiri yang digunakan sebagai usaha atau sebagai investasi. Properti investasi adalah properti (tanah dan bangunan atau bagian dari keduanya) yang dimiliki untuk disewa dengan sewa pendanaan untuk memperoleh pendapatan sewa atau agar terjadi peningkatan modal atau keduanya, bukan digunakan untuk produksi atau menghasilkan barang atau jasa atau untuk administrasi atau untuk penjualan pada bisnis normal, aset yang tidak termasuk properti investasi adalah sebagai berikut:

- Properti yang digunakan oleh pemilik,
- Properti tersedia untuk dijual dalam jangka pendek pada usaha umum,
- Properti yang dikonstruksi atau dibangun mewakili pihak ketiga,
- Properti yang tersedia untuk disewakan berdasarkan sewa operasi,
- Aset biologik,
- Hak pertambangan dan sumber daya mineral.

2.5.1. Pengukuran Properti Investasi Setelah Pengakuan Awal

Hennie (2013: 144) menyatakan entitas dapat memutuskan pengukuran properti investasi setelah pengakuan awal dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- “Model biaya: Mengukur properti investasi pada harga perolehan dikurangi depresiasi dan kerugian penurunan nilai.
- Model Nilai Wajar: Mengukur properti investasi pada nilai wajar. Untung dan rugi dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi komperhensif”.

Namun, “jika pemilik (entitas) mengklasifikasikan properti tersebut sebagai properti investasi, maka pemilik (entitas) tersebut harus mencatat properti investasi dengan menggunakan model nilai wajar” Bragg (2012: 92). “Pengukuran properti investasi berdasarkan nilai wajar (*fair value*) dilakukan sesuai dengan PSAK 16, *Aset Tetap*” PSAK 13 par. 58 (2012).

2.6. Definisi *Fair Value*

Salah satu komponen penting dalam mengevaluasi metode penentuan nilai wajar adalah definisi nilai wajar. Berikut disajikan definisi nilai wajar dalam SAK yang berlaku saat ini dan menurut pendapat lainnya.

1. Menurut PSAK 16 (2012, par. 6) Nilai wajar (*fair value*) adalah “Jumlah suatu aset dipertukarkan antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar”.

2. Menurut Suwardjono (2008;475) *fair value* adalah “Jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu obyek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan”.
3. Menurut IAI dalam Yolinda, 2010 dasar dari definisi *fair value* adalah “Asumsi bahwa entitas atau sebuah perusahaan merupakan unit yang akan beroperasi selamanya tanpa adanya keinginan melikuidasi, untuk membatasi secara material skala operasinya atau transaksi dengan persyaratan yang merugikan”.

Dengan demikian berdasarkan definisi nilai wajar (*fair value*) yang telah dijelaskan diatas, dapat dikatakan *fair value* bukanlah nilai yang akan diterima atau dibayarkan entitas dalam suatu transaksi paksaan, likuidasi dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan. Dengan kata lain nilai wajar (*fair value*) bukanlah jumlah aset yang terbentuk berdasarkan keinginan atau kehendak, dan keadaan keuangan entitas. Tetapi, “nilai wajar (*fair value*) adalah nilai yang diperoleh berdasarkan informasi atau bukti pasar oleh penilai independen yang memiliki kualifikasi profesional” PSAK 16 par. 32 (2012). Oleh karena itu *Fair value* menyampaikan informasi tentang nilai kekayaan dan kepengurusan manajemen dengan menyatakan semua aset pada neraca sesuai dengan keadaan realitas ekonomi.

2.6.1. Definisi Transaksi Wajar (*Arm's Length Transaction*)

PSAK 13 (2012, par. 46) menggambarkan bahwa “transaksi wajar merupakan transaksi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan tertentu

atau khusus, yang membuat harga transaksi tidak mencerminkan karakteristik dari kondisi pasar. Transaksi tersebut dianggap terjadi diantara pihak-pihak yang tidak berelasi, yang masing-masing bertindak secara independen". Artinya, pihak-pihak yang melakukan transaksi wajar adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa atau terlepas dari hubungannya (*relantionship*) pada saat melakukan transaksi wajar walau sesungguhnya pihak-pihak yang terkait memiliki hubungan.

Disamping dari pada itu diperlukan juga pihak ketiga sebagai mediator (penilai profesional) diantara dua belah pihak yang bertransaksi wajar, yang juga besikap independen, seperti yang dinyatakan dalam PSAK 16 par. 32 (2012), serta dinyatakan juga oleh Bragg (2012: 99), bahwa "dianjurkan menggunakan penilaian independen yang memiliki kualifikasi profesional yang diakui dan relevan, dan yang memiliki pengalaman terkini tentang aset yang bersangkutan untuk menentukan nilai wajar". Dengan demikian transaksi wajar yang diinginkan oleh setiap pelaku transaksi benar – benar secara wajar dilakukan.

2.6.2. Latar Belakang Konsep Akuntansi *Fair Value*

Sofyan Syafri (2011: 322), menyatakan "pengukuran yang selama ini dipakai dalam akuntansi keuangan adalah metode *historical cost*, yang berasumsi bahwa kesatuan ekonomi stabil (*Stable Monetary Unit*)". Namun, "inflasi akan membawa dampak terhadap laporan keuangan yang disajikan, sehingga informasi yang ada tidak menjadi relevan dan tidak sesuai dengan

keadaan pasar sesungguhnya. Karena di setiap negara akan mengalami inflasi yang berbeda-beda, ini menunjukkan bahwa prinsip *stable monetary unit* hanya dalam asumsi, tidak pernah ditemukan dalam kenyataan” Sofyan Syafri (2011: 324).

Sofyan Syafri (2011: 326), menyatakan bahwa dalam akuntansi konvensional laporan keuangan menghasilkan nilai buku yang menggunakan *historical cost*. Penggunaan nilai buku untuk mengukur secara langsung nilai aktiva lancar dianggap mudah karena dianggap tepat, namun untuk menaksir nilai aktiva tetap dinilai mengalami kesulitan karena nilai bukunya selalu jauh berbeda dengan harga pasarnya (nilai buku historisnya selalu lebih rendah dari pada harga pasar).

Sofyan Syafri (2011: 323), menyatakan “laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi”, sehingga “dewasa ini terdapat kritik dan ketidakpuasan yang menyatakan bahwa laporan keuangan berbasis *historical cost* telah kehilangan relevansinya bagi investor” Sofyan Syafri (2011: 324).

Sofyan Syafri (1996), menyatakan “keadaan di mana aset dalam konteks ketidakpastian yang tinggi memungkinkan timbulnya kesalahan dalam pengukuran, misalnya *net asset* yang lebih rendah”. Oleh karena itu pengukuran sebaiknya menggunakan metode nilai wajar (*fair value*), sebab “salah satu konsep dasar penilaian adalah nilai harus ditentukan pada harga yang wajar” Sofyan Syafri (2011: 328).

2.6.3. Pengukuran *Fair Value*

Pengukuran *fair value* atau penentuan nilai wajar sangatlah perlu dipertimbangkan, agar nilai aset tetap yang diukur berdasarkan nilai wajar dapat diandalkan. Oleh karena itu SFAS No. 157 par. 18 dan IFRS 13 dalam Indri Hardiani (2014) menyatakan ada tiga teknik pengukuran nilai wajar (*fair value*) yang diperkenankan yaitu :

1. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)
Pendekatan ini menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi yang melibatkan aset yang identic atau sebanding.
2. Pendekatan Kos (*Cost Approach*)
Pendekatan ini mencerminkan jumlah yang akan dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat (*service capacity*) aset (sering disebut biaya pengganti saat ini).
3. Pendekatan Penghasilan (*Income Approach*)
Pendekatan ini mengkonversi jumlah masa depan (contohnya arus kas atau penghasilan dan beban) ke suatu jumlah tunggal saat ini (yaitu didiskontokan). Ketika pendekatan penghasilan digunakan, pengukuran nilai wajar mencerminkan harapan pasar saat ini mengenai jumlah masa depan tersebut.

Namun, pengukuran nilai wajar (*fair value*) yang dianjurkan berdasarkan SAK adalah pengukuran nilai wajar yang berdasarkan PSAK 16 par. 32 (2012) yaitu “pengukuran nilai wajar dilakukan berdasarkan bukti pasar oleh penilai professional” atau dengan kata lain menggunakan pendekatan pasar (*Market Approach*). “Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar, maka mungkin perlu menngestimasi nilai wajar dengan pendekatan penghasilan (*Income Approach*)” PSAK 16 par. 33 (2012).

2.6.4. Keunggulan dan Kelemahan *Fair Value*

A. Keunggulan *Fair Value*

Menurut Wibisana (2009) dalam Zein Yusuf (2010) menyatakan:

bahwa *fair value* memiliki tiga keunggulan dibandingkan dengan *historical cost*, yaitu:

1. *Fair value* menjadikan laporan keuangan menjadi lebih relevan untuk dasar pengambilan keputusan.
2. *Fair value* meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, dengan arti lain *fair value* menjadikan laporan keuangan lebih dapat dibandingkan.
3. *Fair value* menjadikan informasi lebih dekat dengan apa yang diinginkan oleh pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, potensi laba/rugi sebuah perusahaan dapat diprediksi.

B. Kelemahan *Fair Value*

Meskipun *fair value* dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari *historical cost*, namun walaupun begitu tetap terdapat kelemahan dari *fair value*. Berikut kelemahan *fair value*:

1. Silvyana (2011) menyatakan bahwa “*fair value* sangat sensitif terhadap pasar”.
2. Silvyana (2011) menyatakan bahwa: “*Fair value* mengakibatkan perubahan yang terus-menerus pada laporan keuangan perusahaan ketika nilai aset mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini membuat sulit untuk memastikan apakah laba dan rugi diakibatkan oleh keputusan yang dibuat manajemen atau oleh perubahan yang terjadi di pasar”.

3. Menurut Tim Krumwiede (2008: 38) “oportunistik dan ketidakjujuran manajemen dapat mengambil keuntungan dari penilaian dan estimasi yang digunakan”.

2.7. Definisi *Historical Cost*

Model biaya (*historical cost*) menurut PSAK 16 par. 30 (2012) adalah salah satu prinsip pengukuran aset, “dimana setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset”. Dengan demikian “pengukuran *historical cost* tidak terpengaruh oleh keadaan pasar, berasumsi bahwa harga-harga stabil” Sofyan Syafri (2011 : 320).

2.7.1. Latar Belakang Konsep Akuntansi *Historical Cost*

Pada dasarnya laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan nilai historis (*historical cost*). Hal ini dikarenakan “*Historical cost* merupakan salah satu prinsip dasar akuntansi” Kieso (2008: 43). Oleh karena itu sampai saat ini perusahaan melakukan pengukuran dengan menggunakan prinsip *historical cost*.

Disamping dari pada itu, juga dinyatakan oleh Kieso (2008: 44) bahwa “secara umum, pengguna laporan keuangan lebih memilih menggunakan biaya historis karena memberikan tolak ukur yang dapat dipercaya. Hal ini disebabkan biaya historis memiliki keunggulan yang penting dibandingkan dengan penilaian lainnya, yaitu dapat diandalkan”.

Sofyan Syafri (2011: 321), menyatakan “memang banyak kritik diajukan terhadap sistem *historical cost*, namun sampai saat ini standar akuntansi masih tetap mempertahankannya”. Kieso (2008: 45) menyatakan “walaupun dewasa ini kita memiliki sistem akuntansi yang memperbolehkan pemakaian biaya historis, nilai wajar, dan penilaian lainnya, namun biaya historis terus menjadi dasar penilaian yang utama”. Hal ini kemungkinan disebabkan karena “GAAP (*General Accepted Accounting Principles*) mewajibkan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan biaya historis” (Kieso 2008: 43). Dan tidak terlepas juga oleh karena keunggulan dari *historical cost*.

2.7.2. Keunggulan dan Kelemahan *Historical Cost*

A. Keunggulan *Historical Cost*

Memang banyak kritik yang diajukan terhadap *historical cost*, namun sampai saat ini masih tetap digunakan dalam pengukuran akuntansi. Menurut Soejipto (2004 : 4) penggunaan nilai historis dalam akuntansi finansial disebabkan karena beberapa alasan, yaitu:

1. Dalam akuntansi konvensional penggunaan nilai historis relevan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Bagi manajer dalam membuat keputusan masa depan diperlukan data transaksi masa lalu.
2. Nilai historis yang berdasarkan nilai obyektif dapat dipercaya, dapat diaudit dan lebih sulit untuk memanipulasi.
3. Dalam akuntansi konvensional penggunaan nilai historis memudahkan untuk melakukan perbandingan baik antara industri maupun antara waktu untuk suatu industri.

Dan juga dinyatakan dalam Kieso (2008: 43-44) bahwa “nilai historis (*historical cost*) memiliki keunggulan yang mutlak dibandingkan dengan penilaian lainnya, yaitu jauh lebih dapat diandalkan”.

B. Kelemahan *Historical Cost*

Disamping keunggulan yang dimiliki *historical cost*, prinsip ini juga memiliki kelemahan. Menurut Muljono (1995: 48-49) kelemahan penggunaan nilai historis (*historical cost*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya pembebanan biaya yang terlalu kecil karena pendapatan untuk suatu hal tertentu pada saat tertentu akan dibebani biaya yang didasarkan pada suatu nilai uang yang telah ditetapkan beberapa periode yang lalu pada saat pencatatan terjadinya biaya tersebut;
2. Nilai aktiva yang dicatat dalam neraca akan mempunyai nilai yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan perkembangan harga terkini;
3. Alokasi biaya untuk depresiasi akan dibebankan terlalu kecil dan mengakibatkan laba dihitung terlalu besar;
4. Laba-rugi yang terjadi adalah dihasilkan oleh perhitungan laba-rugi yang didasarkan pada asumsi adanya *stable monetary unit* tersebut tidaklah rill apabila diukur dengan perkembangan daya beli uang yang sedang berlangsung.

2.8. Revaluasi

PSAK 16 par. 31 (2012), menyatakan revaluasi adalah “pengukuran setelah pengakuan aset, yaitu nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai”. Berdasarkan pengertian ini dapat juga dikatakan bahwa revaluasi adalah penilaian kembali aset entitas berdasarkan nilai wajar (*fair value*), yaitu nilai pasar terkini yang terkait nilai aset entitas, bukan nilai historis, sebab nilai historis aset bukan nilai yang memperlihatkan nilai realitas ekonomi aset atau



nilai terbaru (nilai ter-*up date*) aset di pasar. “*Historical cost* adalah pengukuran aset yang berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai” PSAK 16 par. 30 (2012). Artinya nilai tercatat aset yang diukur dengan menggunakan prinsip *historical cost* adalah nilai perolehan yang berkurang oleh penyusutan pada periode setelah pengakuan aset, dicatat sebagai nilai tercatat aset, kemudian untuk periode berikutnya nilai tercatat aset dikurangi kembali dengan jumlah penyusutan yang sama setiap periode, dan demikian seterusnya. Itu artinya tidak ada dilakukan penilaian kembali atas nilai perolehan aset ataupun nilai tercatat aset pada setiap periode akuntansinya. Hal ini karena “*Historical cost* menggunakan informasi nilai yang lama (lewat)” Sofyan Syafri (2011: 323).

Zaki Baridwan (2008: 334), menyatakan “untuk aktiva tetap bila harga-harga berubah dalam jumlah yang besar, maka rekening-rekening aktiva yang tetap memakai harga perolehan di masa lalu sudah tidak menunjukkan keadaan yang riil dari aktiva tersebut. Perubahan ini dapat ditanggulangi dengan cara revaluasi dalam keadaan harga-harga naik atau dalam keadaan harga-harga turun”. Dengan demikian untuk melakukan penilaian kembali atau revaluasi dibutuhkan nilai wajar (*fair value*). Yang artinya revaluasi atau penilaian kembali atas nilai aset entitas dikarenakan adanya informasi nilai aset yang baru atau perubahan harga. Oleh karena ada nilai yang baru maka nilai yang lama atau yang lewat (harga perolehan) perlu direvaluasi untuk mendapatkan kewajaran.

Berdasarkan penjelasan pada paragraph yang sebelumnya dan PSAK 16 par 31 (2012) dapat dikatakan bahwa aset yang diukur berdasarkan nilai wajar akan melakukan revaluasi atau harus melakukan revaluasi, sebaliknya aset yang

melakukan revaluasi adalah aset yang pengukurannya berdasarkan nilai wajar (*fair value*) atau untuk melakukan revaluasi dibutuhkan nilai wajar. Dengan demikian artinya revaluasi adalah bagian dari pada *fair value accounting*.

Berdasarkan PSAK 16 par. 34 (2012) “frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali”. Artinya, revaluasi dilakukan ketika diketahui informasi nilai wajar (*fair value*) atas aset tetap yang bersangkutan, apakah nilai wajar (*fair value*) aset tetap tersebut memiliki nilai wajar yang frekuensinya tahunan, tiga atau lima tahun sekali ?

Sofyan Syafri (2011: 327), menyatakan “nilai historis selalu lebih rendah dari harga pasar (*fair value*)”. Itu artinya pengukuran aset entitas dengan menggunakan nilai wajar (*fair value*) akan menjadikan nilai aset entitas lebih tinggi. Artinya nilai aset entitas mengalami kenaikan atau surplus. Surplus nilai aset akan diketahui ketika aset entitas telah melakukan revaluasi dan akan diakui dalam laporan keuangan. Seperti yang dinyatakan dalam PSAK 16 par. 39 (2012) “jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komperhensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya

dalam laba rugi”. Dengan demikian revaluasi memberi dampak terhadap laporan keuangan entitas, berikut ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.7.1

Dampak Revaluasi Terhadap Laporan Keuangan

Keterangan	Aset	Hutang	Ekuitas	Laba/Rugi
Kenaikan aset tetap setelah revaluasi	Naik	Tetap	Naik	Tetap
Penurunan aset tetap setelah revaluasi	Turun	Tetap	Turun	*Turun (Rugi)

2.8.1. Apakah Akumulasi Penyusutan Juga Direvaluasi

Zaki Baridwan (2008: 343), menyatakan “apabila aktiva tetap sudah dinilai kembali maka perhitungan depresiasi didasarkan pada nilai-nilai sesudah penilaian kembali atau revaluasi”. Hal yang sama juga dinyatakan dalam PSAK 16 par. 35 (2012), bahwa “jika aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara, yaitu dengan penyajian kembali secara proposional atau dengan eliminasi akumulasi penyusutan”, dan ditambah dengan pernyataan PSAK 16 par. 41 (2012) yang menyatakan bahwa “jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset”. Dengan demikian, berarti bahwa akumulasi penyusutan juga ikut direvaluasi.

Dalam penelitian ini, akumulasi depresiasi aset tetap diperlakukan berdasarkan PSAK 16 par. 35 (b), (2012), yaitu “akumulasi penyusutan

dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto aset setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi dari aset tersebut. Metode ini sering digunakan untuk bangunan”

2.8.2. Cara Mencatat dan Menyajikan Nilai Revaluasi

Apabila aktiva tetap sudah dinilai kembali maka nilai revaluasian harus dicatat dan diakui dalam laporan keuangan. “Penilaian kembali dicatat agar sesuai dengan persentase keadaan yang ditentukan dari penilaian kembali” Zaki Baridwan (2008: 339). Artinya penilaian kembali harus dicatat agar nilai aset tetap dapat dipercaya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Menurut M. Steven Bragg (2012: 341), penilaian kembali atau revaluasi dicatat sebagai berikut:

* Sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya pada (Sub Bab. 2.8.1. Apakah Akumulasi Penyusutan Juga Direvaluasi), bahwa setelah aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan diperlakukan dengan cara “eliminasi akumulasi penyusutan”. Maka oleh karena itu, pertama sekali entitas membuat jurnal “untuk mengeliminasi akumulasi penyusutan”, sebagai berikut :

	Debet	Kredit
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	XXXXX	
Aset Tetap		XXXXX

Lalu setelah itu, entitas membuat jurnal “untuk mencatat nilai revaluasi atas aset tetap, untuk meningkatkan nilai aset bersih”, sebagai berikut :

					Debet	Kredit
Aset Tetap					XXXXX	
	Surplus Revaluasi					XXXXX

Setelah nilai revaluasian aset tetap dicatat dalam jurnal dan buku besar, maka selanjutnya nilai revaluasian aset tetap tersebut disajikan dalam laporan keuangan. Nilai surplus revaluasian disajikan berdasarkan PSAK 16 par. 39 (2012): “jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komperhensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi”.

PSAK 16 par. 42 (2012), menyatakan bahwa “nilai revaluasi aset tetap dikenakan pajak penghasilan”, dan “pajak penghasilan yang dikenakan atas surplus revaluasi aset tetap adalah pajak penghasilan bersifat final sebesar 10%” Sparta (2011). Surplus revaluasi disajikan pada Laba/Rugi, bagian penghasilan komperhensif (*Other Comperhensive Income*). Penghasilan komperhensif lain (*Other Comprehensive Income*) disajikan bersih dari pajak (*net tax*)” M. Steven Bragg (2012: 14). Dengan demikian surplus revaluasi aset tetap disajikan bersih dari biaya pajak penghasilan pada Laba/Rugi bagian penghasilan komperhensif (*Other Comperhensive Income*).

2.9. Ilustrasi Pengukuran Berdasarkan *Fair Value* dan Berdasarkan *Historical Cost*

Untuk lebih menjelaskan tentang pengukuran aset tetap berdasarkan nilai wajar (*fair value*) dan berdasarkan nilai historis (*historical cost*), serta untuk dapat membandingkannya, berikut ini diberikan ilustrasinya.

Ilustrasi *Fair Value*:

Sibuea Company memiliki gedung serbaguna, dengan harga perolehan sebesar Rp 35.000.000, pada 1 Januari 2010, dengan taksiran umur ekonomi 10 tahun. Sudah dipakai selama 1 tahun, sebesar Rp 3.500.000. Pengukuran nilai dari gedung serbaguna tersebut adalah berdasarkan nilai wajar (*fair value*). Perusahaan akan melakukan revaluasi setiap tahun, dengan melibatkan penilai profesional berdasarkan bukti pasar, yaitu dengan pendekatan pasar (*Market Approach*). Adapun nilai wajar atas gedung serbaguna tersebut pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

Tahun	Harga Perolehan	Nilai Wajar
2010	Rp 35,000,000	Rp35,000,000
2011		Rp40,000,000

Nilai wajar yang ada digunakan untuk menilai kembali atau merevaluasi nilai Gedung Serbaguna, sebagai berikut:

Tabel 2.9.2 Revaluasi Gedung Serbaguna, 31 Desember 2011

	Harga Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Revaluasi
Gross carrying amount	Rp35,000,000	Rp40,000,000	Rp5,000,000
Akumulasi Depresiasi	Rp3,500,000	Rp4,000,000	Rp500,000
Net carrying amount	Rp31,500,000	Rp36,000,000	Rp4,500,000

Setelah dilakukan revaluasi, Sibuea Company akan mencatat nilai revaluasian ke dalam jurnal. Namun sebelum itu, sebagaimana telah dijelaskan, Sibuea Company akan terlebih dahulu membuat jurnal untuk mengeliminasi saldo Akumulasi Penyusutan Gedung Serbaguna sebelum revaluasi, sebagai berikut:

		Debet	Kredit
31 Juni 2011	Akumulasi Penyusutan Gedung Serbaguna	Rp3,500,000	
	Gedung Serbaguna		Rp3,500,000

Dengan demikian saldo Akumulasi Penyusutan Gedung Serbaguna dan Beban Penyusutan Gedung Serbaguna untuk tahun 2011 menjadi Rp 4.000.000 berdasarkan nilai revaluasian. Dan nilai dari Gedung Serbaguna dihapuskan (dieliminasi) sebesar Rp 3.500.000, sehingga saldo Akun Gedung Serbaguna menjadi sebesar Rp 31.500.000. Hal ini bertujuan untuk menyajikan nilai tercatat bersih aset berdasarkan revaluasian.

Kemudian setelah itu, Sibuea Company mencatat nilai revaluasi atas Gedung Serbaguna ke dalam jurnal untuk meningkatkan nilai bersih Gedung Serbaguna, sebagai berikut:

		Debet	Kredit
31 Juni 2011	Gedung Serbaguna	Rp4,500,000	
	Surplus Revaluasi		Rp4,500,000

Jurnal diatas menunjukkan bahwa saldo Akun Gedung Serbaguna yang tadinya sebesar Rp 31.500.000, oleh karena dihapuskan (dieliminasi) sebesar Rp 3.500.000, kini bertambah sebesar Rp 4.500.000, yaitu sebesar surplus revaluasi, sehingga nilai tercatat bersih Gedung Serbaguna menjadi sebesar jumlah revaluasiannya, yaitu Rp 36.000.000.

Untuk lebih jelasnya, pencatatan yang telah dilakukan akan diposting ke buku besar masing – masing akun. Melalui buku besar dari masing – masing akun yang bersangkutan, akan lebih mudah untuk memahami proses pencatatan nilai revaluasian, serta dapat mengetahui akun – akun yang manasajakah yang berhubungan dengan revaluasian. Berikut adalah postingan jurnal revaluasi dan akun – akun yang berhubungan dengan revaluasian:

AKUN Gedung Serbaguna					AKUN NO:	
Tanggal	Uraian	Ref. Post.	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2011						
					Rp35,000,000	
31 Juni	Eliminasi			Rp3,500,000	Rp31,500,000	
	Revaluasi		Rp4,500,000		Rp36,000,000	

Rp 36.000.000 adalah nilai buku bersih Gedung Serbaguna setelah direvaluasi. Sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan PSAK 16 par. 35 (b) (2012), bahwa “Jumlah tercatat net aset setelah eliminasi, disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian”. Dan Rp 4.500.000 adalah “surplus revaluasi yang diakui dalam pendapatan komperhensif dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian Surplus Revaluasi” PSAK 16 par. 39 (2012). Berikut adalah buku besar akun Surplus Revaluasi Gedung Serbaguna:

AKUN Surplus Revaluasi Gedung Serbaguna					AKUN NO:	
Tanggal	Uraian	Ref. Post.	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2011						
31 Juni	Surplus Revaluasi			Rp4,500,000		Rp4,500,000

Zaki Baridwan (2008: 343), menyatakan “apabila aktiva tetap (aset tetap) sudah dinilai kembali, maka perhitungan depresiasi didasarkan pada nilai – nilai sesudah penilaian kembali atau revaluasi”. Dengan demikian nilai depresiasi (penyusutan) tahun 2011 tidak lagi sebesar Rp 3.500.000, tetapi sebesar nilai revaluasian, yaitu Rp 4.000.000. Berikut adalah jurnal untuk mencatat penyusutan Gedung Serbaguna di tahun 2011.

		Debet	Kredit
31 Des 2011	Beban Pey. Gedung Serbaguna	Rp4,000,000	
	Akm. Peny. Gedung Serbaguna		Rp4,000,000

Setelah itu, jumlah Beban Penyusutan Gedung Serbagun dan Akumulasi Penyusutan Gedung Serbaguna pada jurnal diatas diposting ke buku besar, sebagai berikut.

AKUN Beban Penyusutan Gedung Serbaguna					AKUN NO:	
Tanggal	Uraian	Ref. Post.	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2011						
31 Des	Setelah Revaluasi		Rp4,000,000		Rp4,000,000	

AKUN Akumulasi Penyusutan Gedung Serbaguna					AKUN NO:	
Tanggal	Uraian	Ref. Post.	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2011						
	Sebelum Revaluasi					Rp3,500,000
31 Juni	Eliminasi		Rp3,500,000			Rp0
31 Des				Rp4,000,000		Rp4,000,000

Setelah diposting ke buku besar, maka selanjutnya Surplus Revaluasi disajikan ke dalam laporan keuangan. “Surplus Revaluasi disajikan dalam pendapatan komperhensif bersih setelah pajak (*net tax*)” M. Steven Bragg (2012: 14). Surplus Revaluasi dikenakan pajak penghasilan bersifat final sebesar 10%, dengan demikian Surplus Revaluasi disajikan sebesar Rp 4.050.000. Berikut penyajian Surplus Revaluasi dalam laporan keuangan.

Tabel 2.9.3	
Sibuea Company	
Laporan Laba - Rugi (Parsial - <i>Fair Value</i>)	
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011	
Pendapatan	Rp80,000,000
Beban Operasi:	
Beban Gaji	Rp15,000,000
Beban perlengkapan	Rp5,000,000
Beban sewa	Rp6,000,000
Beban utilitas	Rp5,000,000
Beban asuransi	Rp4,000,000
Beban Penyusutan Gedung	Rp4,000,000
Beban rupa - rupa	Rp3,000,000
Total Beban Operasi	Rp42,000,000
Laba Sebelum Pajak	Rp38,000,000
Beban Pajak Penghasilan	Rp5,700,000
Laba operasi tahun berjalan	Rp32,300,000
Pendapatan Komprehensif Lain	
(<i>Other Comprehensive Income</i>), <i>Net Tax</i>:	
Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual - Belikan	Rp4,500,000
Surplus Revaluasi Gedung Serbaguna (bersih dari pajak penghasilan 10%)	Rp4,050,000
Laba Komprehensif	Rp40,850,000

Tabel 2.9.4		
Sibuea Company		
Laporan Ekuitas (Parsial - Fair Value)		
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011		
Modal Sibuea, 1 Januari 2011		Rp110,000,000
Surplus Revaluasi Gedung Serbaguna, 31 Des, 2011	Rp4,050,000	
Laba Tahun Berjalan, 31 Des. 2011	Rp36,800,000	
Laba Komperhensif, 31 Des, 2011		Rp40,850,000

Tabel 2.9.5		
Sibuea Company		
NERACA (Parsial - Fair Value)		
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011		
Aset Lancar:		
Kas		Rp79.500.000
Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual - Belikan		Rp5.000.000
Piutang		Rp10.000.000
Persediaan		Rp9.000.000
Perlengkapan		Rp8.000.000
Sewa dibayar dimuka		Rp12.000.000
Total Aset Lancar		Rp123,500,000
Aset Tetap:		
Tanah		Rp13.000.000
Gedung Serbaguna	Rp36.000.000	
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Gedung Serbaguna	Rp4.000.000	
Nilai Tercatat Bersih Gedung Serbaguna		Rp32.000.000
Total Aset Tetap		Rp45,000,000
Total Aset		Rp168,500,000
Kewajiban	Rp17.650.000	
Total Kewajiban		Rp17,650,000
Ekuitas:		
Modal Sibuea		Rp110.000.000
Surplus Revaluasi Gedung Serbaguna	Rp4.050.000	
Laba Tahun Berjalan	Rp36.800.000	
Laba Komperhensif		Rp40,850,000
Total Eukitas dan Kewajiban		Rp168,500,000

Setelah itu, Sibuea Company membuat jurnal penutup, untuk menutup (me-nolkan) saldo akun Ikthisar Laba-Rugi, dan memindahkannya ke pada akun Modal (Ekuitas), sebagai berikut.

Jurnal Penutup, untuk menutup saldo laba tahun 2011 dan memindahkannya ke Akun Modal Sibuea.						
					Debet	Kredit
31 Des, 2011	Ikthisar Laba Rugi				Rp40,850,000	
		Modal Sibuea				Rp40,850,000

Melihat jurnal penutup diatas dan laporan keuangan yang telah disajikan, dapat dilihat dampak Surplus Revaluasi terhadap struktur modal entitas. Bahwa ketika jurnal penutup dibuat untuk menutup akun Ikthisar Laba-Rugi terhadap akun Modal, pada saat yang bersamaan dengan itu nilai Surplus Revaluasi juga terakumulasi ke dalam akun Modal (Ekuitas), sebab pada akun Ikthisar Laba-Rugi sudah termasuk (*include*) Surplus Revaluasi. Setelah itu, jurnal penutup diatas diposting ke buku besar, maka dapat dilihat saldo akun Modal sesuai dengan jumlah pada Laporan Ekuitas. Berikut buku besar Akun Modal Sibuea Company:

AKUN Modal Sibuea					AKUN NO:	
Tanggal	Uraian	Ref. Post.	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2011						
						Rp110,000,000
31 Des	Jurnal Penutup			Rp40,850,000		Rp150,850,000

Demikianlah seterusnya yang akan dilakukan oleh Sibuea Company dalam menilai Gedung Serbaguna miliknya, jika dengan berdasarkan nilai wajar (*fair value*). Melakukan penilaian kembali atau revaluasi atas Gedung Serbaguna miliknya pada tahun - tahun berikutnya dengan nilai wajar yang meningkat (naik).

Namun, bagaimana jika terjadi penurunan nilai wajar dari tahun sebelumnya? Tentulah ini pertanyaan yang akan timbul, sebab jika ada kenaikan, tentu ada penurunan. PSAK 16 par. 40 (2012), menyatakan “Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Namun, penurunan nilai tersebut diakui dalam pendapatan komperhensif lain (*Other Comperhensive Incoem*) selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut”. Dengan kata lain, bahwa jumlah maximal dari penurunan nilai aset akibat revaluasi yang dapat diakui hanyalah sebesar saldo kredit surplus revaluasi aset tersebut. Dengan demikian artinya, sesungguhnya nilai aset tersebut akan kembali pada nilai normalnya (nilai berdasarkan historisnya), jika ada penurunan nilai yang melebihi saldo kredit surplus revaluasi aset tersebut. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa penurunan nilai aset tersebut bukanlah kerugian yang bersifat permanen, jika aset dinilai berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

Namun, jika penurunan nilai aset tidak melebihi dan tidak pas sebesar saldo kredit surplus revaluasi, maka saldo kredit surplus revaluasi akan tetap berkurang namun, tetap memiliki saldo kredit surplus revaluasi, dengan begitu nilai wajar masih tetap lebih tinggi dari biaya historis.

Pengukuran *Historical Cost*.

Dengan soal yang sama seperti yang sebelumnya dipakai dalam ilustrasi pengukuran *Fair Value*, juga dipakai untuk mengilustrasikan pengukuran *Historical cost* agar dapat terlihat dengan mudah perbandingannya.

Pengukuran *Historical Cost* adalah pengukuran berdasarkan harga perolehan. Dengan demikian tidak diperlukan informasi nilai wajar, maka dengan begitu tidak dilakukan juga penilaian kembali atau revaluasi atas nilai Gedung Serbaguna, sebagaimana telah dijelaskan pada sub. Bab. 2.8. Revaluasi.

PSAK 16 par. 6 (2012), menyatakan “pada pengakuan awal aset, disaat aset pertama sekali diperoleh, pencatatan yang dilakukan adalah sama, baik dalam pengukuran *Fair Value* maupun dalam pengukuran *Historical Cost*”. Oleh sebab itu ilustrasi *Historical Cost* berikut ini tidak akan menyajikan pencatatan saat pengakuan awal aset, tetapi pengakuan atau pencatatan setelah pengakuan awal. Maka pada tahun 2011 Sibuea Company mengakui atau mencatat Gedung Serbaguna miliknya berdasarkan pengukuran *Historical Cost*, adalah sebagai berikut.

*Adapun saldo awal akun – akun yang berhubungan dengan Gedung Serbaguna pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

AKUN Gedung Serbaguna					AKUN NO:	
Tanggal	Uraian	Ref. Post.	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2011						
					Rp35,000,000	

AKUN Akumulasi Penyusutan Gedung Serbaguna					AKUN NO:	
Tanggal	Uraian	Ref. Post.	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2011						
					Rp3,500,000	

Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011 dibuat jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2011 dan akumulasi penyusutan yang bertambah pada tahun 2011, sebagai berikut:

Jurnal, untuk mencatat Beban Penyusutan Gedung Serbaguna atas Akumulasi Penyusutan Gedung Serbaguna.			
31 Des, 2011	Beban Penyusutan Gedung Serbaguna		Rp3,500,000
		Akumulasi Penyusutan Gedung Serbaguna	Rp3,500,000

Lalu setelah itu, jurnal untuk mencatat Beban Penyusutan Gedung Serbaguna atas Akumulasi Penyusutan Gedung Serbaguna di tahun 2011 diposting ke buku besar masing – masing.

AKUN Beban Penyusutan Gedung Serbaguna					AKUN NO:	
Tanggal	Uraian	Ref. Post.	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2011						
31 Des	Jurnal Penyesuaian		Rp3,500,000		Rp3,500,000	

AKUN Akumulasi Penyusutan Gedung Serbaguna					AKUN NO:	
Tanggal	Uraian	Ref. Post.	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2011						
						Rp3,500,000
31 Des	Jurnal Penyesuaian			Rp3,500,000		Rp7,000,000

Kemudian saldo akun – akun tersebut disajikan dalam laporan keuangan, sebagai berikut:

Tabel 2.9.6	
Sibuea Company	
Laporan Laba - Rugi (Parsial - <i>Historical Cost</i>)	
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011	
Pendapatan	Rp80,000,000
Beban Operasi:	
Beban Gaji	Rp15,000,000
Beban perlengkapan	Rp5,000,000
Beban sewa	Rp6,000,000
Beban utilitas	Rp5,000,000
Beban asuransi	Rp4,000,000
Beban penyusutan	Rp3,500,000
Beban rupa - rupa	Rp3,000,000
Total Beban Operasi	Rp41,500,000
Laba Sebelum Pajak	Rp38,500,000
Beban Pajak Penghasilan	Rp5,775,000
Laba operasi tahun berjalan	Rp32,725,000
Pendapatan Komprehensif Lain (<i>Other Comprehensive Income</i>), <i>Net Tax</i>:	
Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual - Belikan	Rp4,500,000
Laba Komprehensif	Rp37,225,000

Tabel 2.9.7	
Sibuea Company	
Laporan Ekuitas (Parsial - <i>Historical Cost</i>)	
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011	
Modal Sibuea, 1 Januari 2011	Rp110,000,000
Laba Komprehensif Tahun Berjalan, 31 Desember 2011	Rp37,225,000
Total Ekuitas, 31 Desember 2011	Rp147,225,000

Tabel 2.9.8		
Sibuea Company		
NERACA (Parsial - Historical Cost)		
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011		
Aset Lancar:		
Kas	Rp80,750,000	
Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual - Belikan	Rp5,000,000	
Piutang	Rp10,000,000	
Persediaan	Rp9,000,000	
Perlengkapan	Rp8,000,000	
Sewa dibayar dimuka	Rp12,000,000	
Total Aset Lancar		Rp124,750,000
Aset Tetap:		
Tanah	Rp13,000,000	
Gedung Serbaguna	Rp35,000,000	
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Gedung serbaguna	-Rp7,000,000	
Total Aset Tetap		Rp41,000,000
Total Aset		Rp165,750,000
Kewajiban	Rp18,525,000	
Total Kewajiban		Rp18,525,000
Ekuitas:		
Modal Sibuea	Rp110,000,000	
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Rp37,225,000	
Total Ekuitas dan Kewajiban		Rp165,750,000

Setelah itu, dibuat jurnal penutup untuk menutup akun Ikhtisar Laba-Rugi terhadap akun Modal, namun tidak ada nilai Surplus Revaluasi Gedung Serbaguna yang ditransfer ke akun Modal. Berikut jurnal penutupnya.

Jurnal Penutup, untuk menutup saldo laba tahun 2011 dan memindahkannya ke Akun Modal Sibuea.						
31 Des, 2011	Ikthisar Laba Rugi				Rp37,225,000	
		Modal Sibuea				Rp37,225,000

Kemudian setelah itu, jurnal penutup di atas diposting ke buku besar, sebagai berikut:

AKUN Modal Sibuea					AKUN NO:	
Tanggal	Uraian	Ref. Post.	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2011						
						Rp110,000,000
31 Des	Jurnal Penutup			Rp37,225,000		Rp147,225,000

Demikianlah seterusnya, pada tahun – tahun berikutnya Sibuea Company akan menilai Gedung Serbaguna miliknya, jika berdasarkan pengukuran *Historical Cost*. Maka dengan begitu nilai tercatat bersih Gedung Serbaguna akan terus menurun pada tahun – tahun berikutnya, lebih rendah dari nilai wajarnya (*fair value*).

2.10. Penelitian Terdahulu

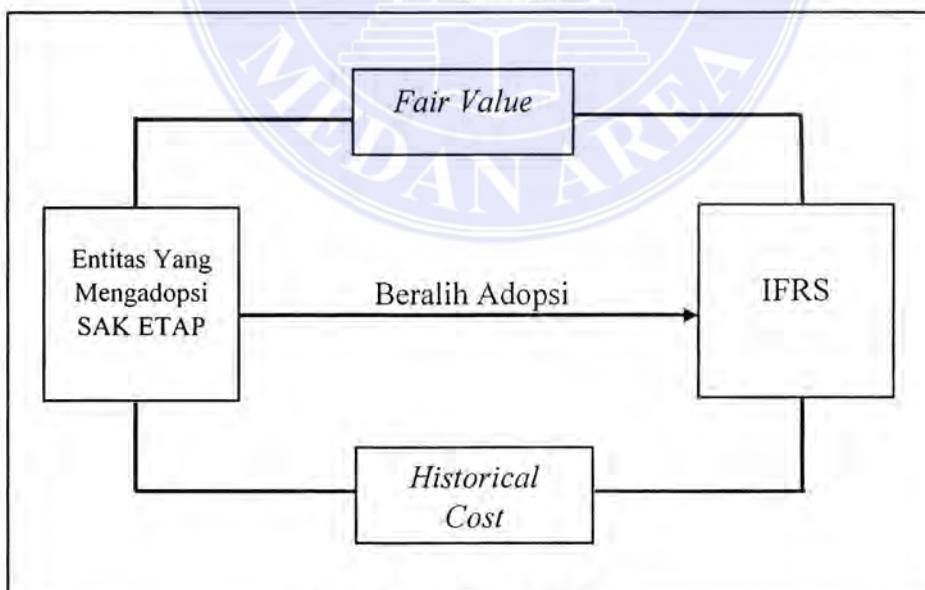
Pada penelitian terdahulu akan diuraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang didapat oleh penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2011, Sparta dan Perwita Sari dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan *Fair Value Based* Pada Aktiva Tetap Studi Kasus Pada PT. Pembangunan Jaya Ancol. Tbk, menyimpulkan bahwa penerapan *fair value based* memberikan dampak terhadap profitabilitas dan solvabilitas perusahaan tetapi tidak berdampak terhadap likuiditas perusahaan. Kenaikan nilai aktiva tetap akibat revaluasi menurunkan profitabilitas perusahaan dan meningkatkan struktur modal sendiri perusahaan yang berdampak pada solvabilitas perusahaan menjadi lebih baik. Sehingga nilai aktiva tetap yang dilaporkan atau kualitas laporan keuangan secara keseluruhan menjadi lebih relevan.

Pada tahun 2011, Silvyana Maria I dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perbandingan Model *Fair Value* dan Model *Historical Cost* Serta Penerapannya Terhadap Aset Tetap, menyimpulkan bahwa ternyata lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk menerapkan *fair value* karena dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya / nilai wajar dan dapat dipakai untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki dibandingkan dengan, jika perusahaan menerakan *historical cost*. Jadi penilai wajar secara efektif telah diperluas untuk semua jenis aset tetap, sebab memampukan manajer untuk mencatat income dengan wajar. Hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan apabila perusahaan ingin mendaftarkan perusahaannya di bursa efek.

2.11. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur pokok penelitian yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka dibuatlah kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.11.1

Kerangka Konseptual

IFRS (*International Financial Reporting Standards*) secara garis besar menyajikan laporan keuangan berdasarkan *fair value accounting*. IAS (*International Accounting Standards*) secara garis besar mengatur pengukuran aset tetap berdasarkan *fair value accounting*. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) telah mengkonvergensi IAS dan IFRS. Dengan demikian SAK memperbolehkan pengukuran nilai aset tetap berdasarkan *fair value accounting*, sedangkan SAK ETAP dalam hal pengukuran aset tetapnya menggunakan prinsip *historical cost*.

Apabila perusahaan yang mengadopsi SAK ETAP ingin beralih mengadopsi IFRS atau SAK berbasis IFRS untuk tujuan *go public*, maka agar lebih relevan perusahaan harus mengukur aset tetapnya berdasarkan *fair value accounting*.

2.12. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah menganalisis. Berdasarkan penjelasan dan kerangka konseptual sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga bahwa *fair value* dapat memberikan informasi akuntansi yang relevan dan realibilitas.
2. Diduga bahwa *fair value* dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi laporan keuangan.
3. Diduga bahwa *fair value* dapat merangsang penghimpunan dana atau modal bagi perusahaan.

4. Diduga bahwa *fair value* dapat memberikan harapan keuangan dimasa yang akan datang.
5. Diduga bahwa *fair value* dapat dijadikan sebagai alat untuk meramalkan keuangan di waktu yang akan datang.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah “penelitian yang berdasarkan sumber data dan unit analisisnya. Penelitian kepustakaan ada yang berbentuk teoritis dengan unit analisis berupa teori-teori dan ada yang berbentuk eksperimen dengan unit analisis berupa fakta empiris. Penelitian kepustakaan teoritis ada yang bersifat dekriptif, analisis, pengembangan model teori, dan empirik” (P. Manurung, 2012: 12). Adapun secara spesifik penelitian kepustakaan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan teoritis yang bersifat deskriptif kualitatif. Penulis meneliti perbandingan antara *historical cost* dengan *fair value* yang sebagai unit analisisnya, dan teori-teori yang diperoleh dari informasi, jurnal, buku penelitian terdahulu, dan tulisan ilmiah adalah sebagai sumber data penelitian.

3.1.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang direncanakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.1

Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2014				2015				
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei
1	Pengajuan Judul									
2	Penyelesaian Proposal									
3	Bimbingan Proposal									
4	Seminar Proposal									
5	Pengumpulan Data									
6	Pengolahan Data									
7	Seminar Hasil									
8	Meja Hijau									

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif.

3.2.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa teori, buku, jurnal, penelitian terdahulu, informasi, dan tulisan ilmiah yang sudah ada, yang berhubungan dengan *Fair Value*, *Historical Cost*, Konvergensi IFRS, dan SAK ETAP.

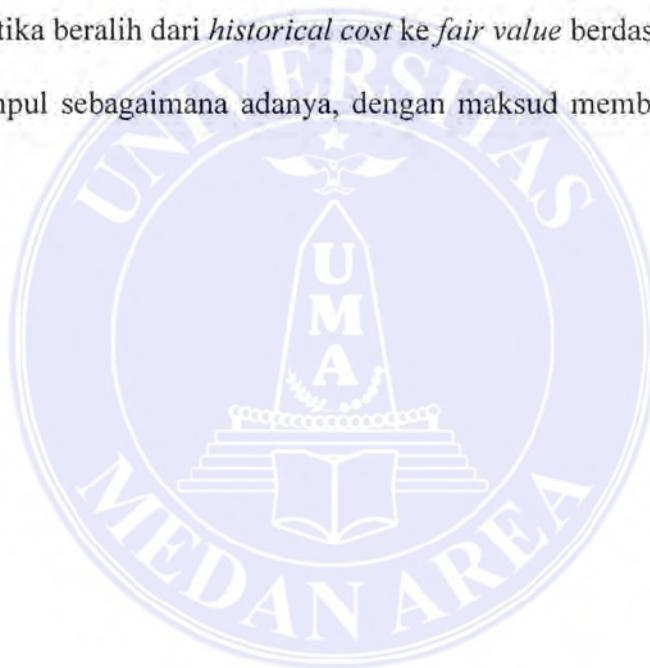
3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan, pencatatan, serta mengadopsi data yang diperoleh dari teori, buku, jurnal, penelitian terdahulu, informasi,

dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan *Fair Value*, *Historical Cost*, Konvergensi IFRS, dan SAK ETAP.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan perbandingan *historical cost* dengan *fair value* dan manfaat *fair value* yang diperoleh ketika beralih dari *historical cost* ke *fair value* berdasarkan data kualitatif yang telah terkumpul sebagaimana adanya, dengan maksud membuat kesimpulan dan saran.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mengadopsi SAK ETAP memperoleh manfaat atas penerapan *fair value* dalam pengukuran aset tetap ketika beralih mengadopsi IFRS atau SAK berbasis IFRS. Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran *Fair Value* dapat mengurangi beban pajak perusahaan, bukan maksud semata – mata sebagai tindakan spekulasi.
2. Pengukuran *Fair Value* meningkatkan nilai atas aset tetap perusahaan.
3. Pengukuran *Fair Value* memperkuat total modal atau ekuitas perusahaan.
4. Pengukuran *Fair Value* yang relevan dapat mempengaruhi pengguna informasi untuk bersedia menanamkan modalnya kepada perusahaan, atau dengan kata lain pengukuran *Fair Value* mampu merangsang pertumbuhan modal perusahaan.
5. Pengukuran *Fair Value* yang relevan meyakinkan para kreditur untuk memberikan pinjaman.
6. Kenaikan nilai aset tetap berdasarkan nilai wajar (*fair value*) menaikkan total modal perusahaan, sehingga rasio solvabilitas perusahaan naik.
7. Pengukuran *Fair value* meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan perusahaan, karena *fair value* mencerminkan nilai realitas aset.

8. Pengukuran *Fair Value* lebih relevan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai dasar untuk meramalkan arus kas masa depan. Dan dengan kualitas relevansi yang lebih baik, pengukuran *Fair Value* mampu memberikan gambaran bagi perusahaan untuk merencanakan bisnis ataupun investasinya.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis bagi perusahaan yang masih mengadopsi SAKETAP adalah sebaiknya beralih mengadopsi SAK berbasis IFRS sebagai standar akuntansi keuangannya, sehingga dapat menilai aset tetap dengan menggunakan pengukuran *Fair Value*, dan memperoleh manfaat – manfaat yang telah uraikan sebelumnya pada (Sub. Bab. Kesimpulan) untuk membangun keuangan perusahaan..

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. J. 1966. *Accounting, Evaluation and Economic Behavior*, Prentice Hall Inc, Englewood.
- Baridwan, Zaki. 2008. *Intermediate Accounting*, Edisi Delapan. BPFE, Yogyakarta.
- Hardiani, Indri. 2014. *Fair Value Measurement : Masalah Baru Atau Solusi Pada Pelaporan Keuangan (Studi Fenomologi Atas Pandangan Auditor)*. Semarang.
- Hendrikson, Eldon S. 1982. *Accountingn Theor, The Fourth Edition*, Richard D. Irwin Inc, Illinois.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16, Tentang Aset Tetap*, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 13, Tentang Properti Investasi*, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Bab. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 48, Tentang Penurunan Nilai Aset*, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 68, Tentang Pengukuran Nilai Wajar*, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Kieso, Donald E, Jerry J Weygandt, Terry D Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate Accounting*, Edisi Keduabelas, Jilid satu. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kieso, Donald E, Jerry J Weygandt, Terry D Warfield. 2010. *Intermediate Accounting, Thirteenth Edition, International Student Version* : John Willey & Sons Inc, New York.
- Krumwiede, Tim. Agustus 2008. *Strategic Finance : Why Historical Cost Accounting Make Sense*, _____ .

- M, Steven Bragg. 2012. *Panduan IFRS*, Edisi Revisi. Indeks, Jakarta
- Manurung, P. 2012. *Metodologi Penelitian*. Halaman Moeka, Medan.
- Maria, Silvyana I. 2011. *Analisis Perbandingan Model Fair Value dan Model Historical Cost Serta Penerapannya Terhadap Aset Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sidomulyo Selaras. Tbk*. Jakarta.
- Muljono, Teguh Pudjo. 1995. *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*, Edisi Revisi Tiga. Djambatan, Jakarta.
- S, Carl Warren, James M. Reeve dan Philip E. Fess. 2008. *Accounting : Pengantar Akuntansi*, Buku Satu, Edisi Dua Puluh Satu, Terjemahan : Aria Farahmita, Amanungrahani dan Taufik Hendrawan, Salemba Empat, Jakarta.
- Sparta dan Perwita Sari. 2011. *Analisis Penerapan Fair Value Based Pada Aktiva Tetap Studi Kasus Pada PT. Pembangunan Jaya Ancol. Tbk*. Jakarta.
- Stephen, H. Penman. 2007. *Accounting and Business Reaserch Special Issues : Financial Reporting Quality : is Fair Value a Plus or Minus*, _____ .
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi : Perekayasaan Laporan Keuangan*. BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Syafri, Sofyan Harahap. 2011. *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.
- Yanti, Yolinda Sonbay. 2010. *Perbandingan Biaya Historis dan Nilai Wajar (Historical Cost Versus Fair value)*. Kupang.
- Yusuf, Zein. 2010. *Fair Value Accounting. Wajarkah Bagi Keuangan Perusahaan?*. _____ .